

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan derasny arus globalisasi dan modernisasi, masyarakat duniapun tidak luput dari perkembangan globalisasi yang mewarnai seluruh aspek kehidupan. Globalisasi merupakan sebuah proses yang bersifat multidimensional, namun gemerlap material yang selalu membayangnya mendorong orang untuk memandangnya dari sudut pandang makro ekonomi. Pandangan Hiperglobalis, pada era globalisasi akan ada dua aktor didalamnya, yaitu pemenang dan pecundang. Pemenang dan pecundang ditentukan oleh daya respon terhadap globalisasi. Merespon globalisasi adalah meningkatkan kemampuan bersaing dalam era integrasi ekonomi global. Kemampuan ini tidak hanya bertumpu pada negara, tetapi juga aktor-aktor yang terlibat dalam globalisasi dan integrasi ekonomi, baik itu firma besar atau korporasi, individu, atau sektor-sektor yang produktif. Persaingan mendapatkan keuntungan dari globalisasi memastikan kemampuan yang memadai dalam hal kompetisi, yakni kemampuan industrial baik dalam hal inovasi, strategi produk, marketing, dan lain sebagainya<sup>1</sup>.

Persaingan ini sangat terlihat pada industri perdagangan, dimana sektor perdagangan telah dihuni banyak pemain, mulai dari hipermarket, supermarket, hingga minimarket yang jumlahnya semakin menjamur. Di Indonesia,

---

<sup>1</sup>Irdayanti. 2012. Peran Pemerintah dalam Pengembangan UKM Berorientasi Ekspor Studi Kasus: Klaster Kasongan dalam Rantai Nilai Tambah Global. *Jurnal Transnasional Vol. 3 No. 2 Februari 2012*.hal 1-17

supermarket lokal telah ada sejak tahun 1970-an dan masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Kondisi ini ditambah dengan mulai masuknya supermarket bermerek asing ke Indonesia pada akhir tahun 1990-an semenjak adanya kebijakan investasi asing langsung dalam sektor usaha ritel yang dibuka pada tahun 1998. Akibat dari meningkatnya persaingan di kota-kota besar telah mendorong munculnya supermarket di kota-kota yang lebih kecil dalam rangka untuk mencari pelanggan baru dan terjadinya perang harga. Akibatnya, bila pada era tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an supermarket di Indonesia hanya melayani masyarakat kelas menengah ke atas, setelah periode tersebut menjamur ke kota yang lebih kecil<sup>2</sup>.

Menjamurnya jumlah supermarket hingga ke kota-kota kecil dan adanya strategi pemangkasan harga atau *discount* memungkinkan konsumen kelas menengah ke bawah untuk mengakses supermarket. Kendati persaingan antar pedagang modern tersebut secara teoritis menguntungkan konsumen, dan mungkin perekonomian secara keseluruhan, namun dampak pada pasar tradisional tersebut relatif masih belum diketahui, hal ini dapat dilihat dari salah satu penelitian yang dilakukan Suryadarma dkk di lima pasar tradisional di Depok dan Bandung Jawa Barat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa supermarket dan hipermarket berpengaruh terhadap penurunan omzet dan keuntungan. Hasil penelitian tersebut juga mengemukakan bahwa

---

<sup>2</sup>CPIS. 1994. *Perdagangan Eceran di Indonesia: Skala Kecil vs Skala Besar*. Jakarta: Center for Policy and Implementation Studies.

diperlukannya pemberdayaan dari pemerintah baik dalam kebijakan perbaikan infrastruktur maupun yang berkaitan dengan izin pembangunan ritel<sup>3</sup>.

Berdasarkan hasil penelitian Suryadarma dkk mengisyaratkan adanya strategi dan program khusus dari pemerintah untuk melakukan pemberdayaan terhadap pasar tradisional guna meningkatkan tingkat kesejahteraan pedagang pasar tradisional, menjaga omzet dan keuntungan pedagang pasar tradisional yang pada umumnya berasal dari masyarakat menengah ke bawah. Mengingat jumlah pasar tradisional yang ada di kabupaten Bantul hanya berjumlah 31 pasar, sangat kontras dengan jumlah pasar modern yang mencapai tiga kali lipat yakni 98 ritel. Kemudian berdasarkan hasil *survey* menunjukkan bahwa mata pencaharian masyarakat Bantul yang berprofesi sebagai pedagang di pasar tradisional berada di urutan kedua yakni sekitar 18%, dimana mata pencaharian utama masyarakat Bantul adalah petani yang jumlahnya mencapai 42%<sup>4</sup>. Sementara pasar modern hanya dimiliki oleh segelintir orang, yang tidak jarang orang tersebut berasal dari luar Kabupaten Bantul. Kemudian jumlah tenaga kerja yang terserap oleh pasar tradisional di Kabupaten Bantul mencapai puluhan ribu jiwa, keadaan ini terlihat dari data yang menunjukkan sedikitnya terdapat 12.200 pedagang yang tercatat secara resmi berjualan di pasar tradisional, jumlah ini diluar pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang emperan, buruh panggul, dan berbagai jenis pekerjaan integral lainnya yang ada di pasar tradisional. Berbeda dengan pasar modern yang umumnya

---

<sup>3</sup> Suryadarma dkk. 2007. *Dampak Supermarket Terhadap Pasar dan Pedagang Ritel Tradisional di Daerah Perkotaan di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.

<sup>4</sup> <http://www.gemari.or.id>

membatasi jumlah pegawai untuk menekan biaya operasional, sehingga menyerap sedikit tenaga kerja.

Merespon keadaan tersebut Pemerintah Kabupaten Bantul berusaha melindungi pedagang pasar tradisional dengan mengeluarkan PERDA (peraturan daerah) No.17 tahun 2012. Khususnya pada pasal 21 ayat 2 dijabarkan mengenai jarak antara pasar modern dengan pasar tradisional :

1. Jarak pendirian minimarket dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 75 (tujuh puluh lima) meter persegi dan semua minimarket berjejing paling dekat dalam radius 3.000 (tiga ribu) meter dari pasar tradisional;
2. Jarak pendirian minimarket dengan ukuran luas lantai penjualan sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) meter persegi yang bukan minimarket berjejing paling dekat dalam radius 500 (lima ratus) meter dari pasar tradisional;
3. Jarak pendirian supermarket dan departemen store paling dekat dalam radius 3.000 (tiga ribu) meter dari pasar tradisional;
4. Jarak pendirian hypermarket dan perkulakan paling dekat dalam radius 5.000 (lima ribu meter) meter dari pasar tradisional; dan
5. Jarak pendirian toko modern pada wilayah perbatasan dengan Kabupaten/Kota lain, paling dekat dalam radius 1.000 (seribu) meter dari pasar tradisional Kabupaten/Kota di luar daerah.

Selain mengatur jarak pasar modern, dalam PERDA (peraturan daerah) tersebut Pemerintah Kabupaten Bantul juga mengatur mengenai jam buka, sebagaimana isinya yang tertuang pada pasal 21 A ayat 1 :

1. Minimarket yang berdiri dalam radius 3.000 (tiga ribu) meter dari pasar tradisional jam 09.00 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB; dan
2. Supermarket, hypermarket, alfamart, indomart, departement store dan grosir/perkulakan :
  - a. Hari Senin sampai dengan Jum'at, jam 10.00 WIB sampai dengan 22.00WIB; dan
  - b. Hari Sabtu, Minggu dan hari libur, jam 10.00 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB.

Selain hal itu Pemerintah Kabupaten Bantul juga telah mencanangkan pemberdayaan pasar tradisional melalui sejumlah program antara lain : *pasar sehat dan nyaman, promosi pasar tradisional, pemberian bantuan dana bergulir dan perbaikan infrastruktur pasar*. Program pasar sehat diupayakan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk membuat kesan pasar tradisional yang semula kumuh menjadi nyaman seperti mengunjungi pasar modern. Program tersebut antara lain juga pemberian bantuan dana bergulir oleh Pemerintah Kabupaten Bantul ditujukan agar pedagang pasar tidak terjebak dan terbelit oleh rentenir. Selain di atas, Pemerintah Kabupaten Bantul juga mempunyai program promosi pasar yang dilakukan berupa pertunjukan rakyat yang bertujuan untuk menarik pengunjung. Inti dari semua program-program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengunjung, omzet, serta pendapatan pedagang pasar tradisional, serta bukti nyata dari Pemerintah Kabupaten Bantul

yang serius untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat kecil terutama pedagang pasar tradisional<sup>5</sup>.

Peran aktif pemerintah dalam memproteksi dan memberdayakan kegiatan ekonomi masyarakat diharapkan mampu membantu mengatasi berbagai masalah yang ada, namun tidak jarang program pemberdayaan dari pemerintah tidak berjalan sesuai rencana dan tidak efektif pada saat diterapkan. Penelitian yang dilakukan oleh Irdayanti mengenai peran pemerintah dalam pengembangan UKM berorientasi ekspor di Kasongan Bantul menunjukkan bahwa terjadi inefisiensi kebijakan pengembangan ekonomi lokal dalam proses *upgrading* Kasongan dan tidak ditemukannya koordinasi dan sosialisasi dari pemerintah kepada pihak swasta dan masyarakat dalam program pengembangannya. Sarana yang dibangun oleh pemerintah tidak banyak memberikan kontribusi terhadap pengembangan klaster kerajinan di Bantul. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa program Pemerintah Kabupaten Bantul mengenai pengembangan UKM belum efektif karena masih terdapat berbagai persoalan di dalamnya dan belum berkontribusi terhadap pengerajin kasongan<sup>6</sup>.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang efektifitas peran Pemerintah Kabupaten Bantul terkait program pemberdayaan pasar tradisional, dimana penelitian mengenai hal tersebut sejauh yang diketahui penulis belum pernah dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, maka

---

<sup>5</sup>Asparindo.com

<sup>6</sup>Irdayanti. 2012. Peran Pemerintah dalam Pengembangan UKM Berorientasi Ekspor Studi Kasus: Klaster Kasongan dalam Rantai Nilai Tambah Global. *Jurnal Transnasional* Vol. 3 No. 2 Februari 2012. Hal 1-17

penelitian ini berjudul **“Efektivitas Peran Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional Tahun 2012”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah efektivitas peran Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pemberdayaan pasar tradisional tahun 2012?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dan pendukung pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Bantul tahun 2012?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh manakah efektivitas peran Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pemberdayaan pasar tradisional.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dan pendukung pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Bantul tahun 2012.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat baik dari segi teori maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya bahan kepustakaan dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu manajemen khususnya bidang yang berhubungan dengan kebijakan publik yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan kebijakan dan bahan pembelajaran bagi pengambil kebijakan.

## 2. Secara Empiris

Sebagai masukan untuk pengambilan keputusan bagi pihak Pemerintah Kabupaten Bantul khususnya dinas yang mengurus masalah pasar tradisional.

## E. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori adalah bagian dari penelitian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan-hubungan antar variabel yang berdasarkan pada konsep atau definisi tertentu. Pada bagian kerangka dasar teori ini akan dikemukakan teori-teori yang merupakan acuan bagian penelitian yang dilakukan.

### 1. Efektivitas

#### a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tepat untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata “efek” yang berarti pengaruh. Sedangkan efektif adalah sesuatu hal yang dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruhnya<sup>7</sup>.

<sup>7</sup>Yasin, Sulchan.1999. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KB/BESAR) Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru Untuk Pelajar Dan Umum*. Surabaya: Amanah. hal 84

Menurut Peter F. Ducker yang dikutip oleh Yamit mendefinisikan efektivitas adalah menjalankan pekerjaan yang benar (*to do the right things*). Ia juga berpendapat bahwa bagi seorang manajer, yang penting adalah efektif sehingga penetapan pasar sasaran yang setepat-tepatnya merupakan salah satu tugas utamanya. Jika sasaran sudah ditetapkan secara tepat, semua sumber harus dikerahkan untuk mencapainya<sup>8</sup>.

Subagyo mendefinisikan efektivitas sebagai kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan<sup>9</sup>. Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki, maka pekerjaan orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki sebelumnya<sup>10</sup>. Menurut Richard Steer dalam Halim, efektivitas harus dinilai atas dasar tujuan yang bisa dilaksanakan, bukan atas dasar konsep tujuan yang maksimum<sup>11</sup>. Efektivitas diukur dengan menggunakan standar sesuai dengan acuan litbang depdagri.

Handoko efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan untuk menentukan tujuan yang telah ditentukan<sup>12</sup>. Menurut Siagin, efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai

---

<sup>8</sup>Yamit, Zulian. 1998. *Manajemen Produksi dan Operasi*. Second edition. Ekonosia. Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, hal 97

<sup>9</sup>Subagyo, Pengestu. 2000. *Manajemen Operasi*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE, hal 67

<sup>10</sup>Gie, The Liang. 1992. *Ilmu Administrasi: Pengertian, Kedudukan dan Perincian*. Yogyakarta: Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi, hal 32

<sup>11</sup>Steers, Richard M. 1985. *Efektifitas Organisasi*. (Alih Bahasa M. Yamin). Jakarta: Erlangga, hal 65

<sup>12</sup>Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen*. Cetakan Kedelapan belas. Yogyakarta: BPFE. Yogyakarta, hal 55

tidaknya sasaran yang telah ditetapkan<sup>13</sup>. Pengertian efektivitas menurut Yamit lebih berorientasi kepada keluaran (*output*), efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan jika hasil mendekati sasaran maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya<sup>14</sup>. Sitio dalam mendefinisikan efektivitas adalah dengan melakukan hal yang benar pada saat yang tepat untuk jangka waktu yang panjang baik pada organisasi tersebut dan pelanggan<sup>15</sup>. Selanjutnya menurut Hodge menguraikan bahwa efektivitas sebagai ukuran suksesnya organisasi, didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk mencapai segala keperluannya. Ini berarti bahwa organisasi mampu menyusun dan mengorganisasikan sumber daya untuk mencapai tujuan<sup>16</sup>.

Ditinjau dari segi pengertian efektivitas di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa efektivitas adalah sejauh mana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam :

- 1) Pelaksanaan tugas pokok
- 2) Kualitas produk yang dihasilkan
- 3) Produktivitas
- 4) Perkembangan.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan

<sup>13</sup>Siagian, Sondang P. 1998. *Manajemen Strateji*. Jakarta: Bumi Aksara, hal 21

<sup>14</sup>Yamit, Zulian. 1998. *Manajemen Produksi dan Operasi*. Second edition. Ekonosia. Fakultas Ekonomi Ull. Yogyakarta, hal 37

<sup>15</sup>Sitio, Arifin H. T. 2001. *Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga, hal 12

<sup>16</sup>Hodge, Henry G., 1956. *Management Principle Practice and Problems*. Houghton Mifflin, Coy. Boston, hal 299

seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat yang menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya<sup>17</sup>.

#### **b. Ukuran Efektivitas**

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian suatu tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian, yaitu :

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

---

<sup>17</sup>Hidayat. 1986. *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hal 41

- 4) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- 5) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- 8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian<sup>18</sup>.

Sedangkan kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis, yakni :

---

<sup>18</sup>Siagian, Sondang P. 1998. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Bumi Aksara, hal 77

- 1) Pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- 2) Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
- 3) Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana<sup>19</sup>.

Selanjutnya Steers dalam Tangkilisan mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

- 1) Produktivitas
- 2) Kemampuan adaptasi kerja
- 3) Kepuasan kerja
- 4) Kemampuan ber laba
- 5) Pencarian sumber daya<sup>20</sup>

Sedangkan Duncan yang dikutip Steers dalam bukunya "Efektivitas Organisasi" mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut :

- 1) Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian

<sup>19</sup> Martani, H dan Lubis Hari S.B. 1987. *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*. Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia. Jakarta, hal 55

<sup>20</sup> Steers, Richard M. 1985. *Efektifitas Organisasi*. (Alih Bahasa M. Yamin). Jakarta: Erlangga, hal 141

tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu : Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

## 2) Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

## 3) Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja<sup>21</sup>.

Zulkaidi, efektivitas dapat digunakan sebagai suatu alat evaluasi efektif atau tidaknya suatu tindakan (dalam Wahyuningsih D) yang dapat dilihat dari :

- 1) Kemampuan memecahkan masalah, keefektifan tindakan dapat diukur dari kemampuannya dalam memecahkan persoalan dan hal ini dapat dilihat dari berbagai permasalahan yang dihadapi sebelum dan sesudah tindakan tersebut dilaksanakan dan seberapa besar kemampuan dalam mengatasi persoalan.

---

<sup>21</sup>Steers, Richard M. 1985. *Efektifitas Organisasi*. (Alih Bahasa M. Yamin). Jakarta: Erlangga, hal 53

- 2) Pencapaian tujuan, efektivitas suatu tindakan dapat dilihat dari tercapainya suatu tujuan dalam hal ini dapat dilihat dari hasil yang dapat dilihat secara nyata<sup>22</sup>.

Sedangkan Ramdan dkk (dalam Nyak Ilham) mengemukakan ukuran efektivitas dalam sebuah kebijakan adalah sebagai berikut :

- 1) Efisiensi. Suatu kebijakan harus mampu meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya secara optimal.
- 2) Adil. Bobot kebijakan harus ditempatkan secara adil, yakni kepentingan publik tidak terabaikan.
- 3) Mengarah kepada insentif. Suatu kebijakan harus mengarah kepada atau merangsang tindakan dalam perbaikan dan peningkatan sasaran yang ditetapkan.
- 4) Diterima oleh publik. Oleh karena diperuntukkan bagi kepentingan publik maka kebijakan yang baik harus diterima oleh publik.
- 5) Moral. Suatu kebijakan harus dilandasi oleh moral yang baik.

Pada penelitian ini penyusun menggunakan ukuran efektivitas peran Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pemberdayaan pasar tradisonal dengan menggunakan ukuran efektivitas yang di nyatakan oleh Ramdan dkk (dalam Nyak Ilham). Hal ini dikarenakan dalam setiap

---

<sup>22</sup>Wahyuningsih, D. 2005. *Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan di Kelurahan Salaman Moyo Kabupaten Semarang*. Tugas Akhir tidak diterbitkan, Proqram Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Semarang, hal 22

peran pemerintah melalui regulasi kebijakan harus efisien, adil, mengarah kepada insentif, diterima oleh publik dan bermoral<sup>23</sup>.

## 2. Peran

Peran pada dasarnya adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang, sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar yang bersifat stabil<sup>24</sup>.

Sokanto, mendefinisikan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi, peran juga dapat diartikan sebagai perikelakuan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat<sup>25</sup>.

Yasyin menjelaskan peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan<sup>26</sup>.

Sedangkan dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat<sup>27</sup>. Konsep tentang peran (*role*) menurut Komarudin adalah sebagai berikut :

a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.

<sup>23</sup> Nyak ilham, Hermanto Siregar, dan D.S Priyarsono. *Efektifitas kebijakan harga pangan terhadap ketahanan pangan*. Jurnal Argo Ekonomi. Volume 24 No.2, Oktober 2006 : 157-177

<sup>24</sup> Kozier, Barbara. 1995. *Fundamental of Nursing*, Caloformia : Copyright by. Addist Asley Publishing Company, hal 21

<sup>25</sup> Soekanto, Soerjono. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, hal 238

<sup>26</sup> Yasyin, Sulchan. 1999. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KB/BESAR) Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru Untuk Pelajar Dan Umum*. Surabaya: Amanah, hal 176

<sup>27</sup> Yasyin, Sulchan. 1999. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KB/BESAR) Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru Untuk Pelajar Dan Umum*. Surabaya: Amanah. hal 667

- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau karakteristik yang ada padanya.
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat<sup>28</sup>.

Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang<sup>29</sup>.

Soekanto, mendefinisikan peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu :

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan

---

<sup>28</sup>Komarudin. 1994. Ensiklopedia Manajemen. Jakarta: Bina Aksara, hal 768

<sup>29</sup>Sedarmayanti. 2004. Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian Kedua: Membangun Manajemen Sistem Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik). Bandung: Mandar Maju, hal 33

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

- 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat<sup>30</sup>.

### 3. Pemerintah Daerah

Mariun menjelaskan pengertian pemerintah dan pemerintahan sebagai berikut :

- 1) Istilah Pemerintahan menunjukkan pada bidang atau dilapangan fungsi bidang tugas dan pekerjaan.
- 2) Istilah Pemerintah menunjukkan pada badan, organisasi atau alat perlengkapan yang menjelaskan fungsi itu.

Selanjutnya beliau menjelaskan tentang pengertian pemerintahan dalam arti luas dan sempit sebagai berikut :

- 1) Pemerintahan dalam arti luas adalah segala sesuatu tugas kewenangan/kekuasaan negara yang mengikuti pembedangan dari teori montesquid yang mengikuti bidang Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.
- 2) Pemerintahan dalam arti sempit diartikan sebagai tugas atau kewenangan/kekuasaan dalam eksekutif saja<sup>31</sup>.

Sedangkan menurut Maschab Pemerintah Daerah adalah satuan aparatur Negara yang berwewenang memerintah suatu kesatuan masyarakat

<sup>30</sup>Soekanto, Soerjono. 2003. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo, hal 243

<sup>31</sup>Mariun. 1979. Azas Ilmu Pemerintahan. Yogyakarta: BPA, Fisispol UGM, hal 9

hukun yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak dan berkewajiban mengatur rumah tangganya sendiri dalam lingkungan negara.

Organ yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

1) Pemerintah Daerah, dalam konteks Indonesia adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945.

Pemerintahan Daerah data berupa : Daerah Provinsi, yakni terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi. Pemerintah Daerah Provinsi terdiri dari Gubernur dan Perangkat Daerah ,yang meliputi Sekretariat Daerah , Dinas Daerah,dan Lembaga Teknis Daerah.

2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yakni terdiri dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri ata Bupati, Wali Kota dan Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan<sup>32</sup>.

Wigjaja, pada dasarnya pelayan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, ia diadakan untuk melayani masyarakat serta menciptakan

---

<sup>32</sup>Maschab, Mashuri. 1982. *Pemerintah di Daerah*. Yogyakarta: UGM, 32

kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitas demi mencapai kemajuan bersama, bukan diadakan untuk melayani diri sendiri. Salah satu yang menjadi tugas dan fungsi utama dari Pemerintah Daerah adalah mengoptimalisasi pelayanan dan pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah<sup>33</sup>.

Penelitian ini menekankan pada aspek peran pemerintah daerah yakni Pemerintah Kabupaten Bantul saja, dalam aktivitasnya sebagai pelayan masyarakat yang berkewajiban melakukan pembangunan daerah serta melindungi masyarakat yakni para pedagang tradisional. Pemerintah daerah yang harus mengambil peran dalam penyelenggaraan pemerintah, mengingat keberdaannya dengan lebih dekat dengan masyarakat dibandingkan pemerintah pusat.

#### **4. Pemberdayaan**

##### **a. Pengertian Pemberdayaan**

Richard Carver, pemberdayaan adalah ketersediaan individu-individu dibawah situasi dan kondisi yang tepat untuk mengemban tanggung jawab pribadi untuk memperbaiki situasi dimana mereka berbeda. Selanjutnya, menurut Steward pemberdayaan menuntut lebih banyak kecakupan dan sumberdaya manajerial yang menuntut

---

<sup>33</sup>Wigjaja, Haw. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 23

digunakannya seperangkat kecakapan baru yaitu membuat mampu, memperlancar, berkonsultasi, dan bekerjasama<sup>34</sup>.

Shardlow, menjelaskan bahwa pengertian mengenai pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok maupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Gagasan ini mengartikan pemberdayaan sebagai upaya mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitannya dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mendorong akselerasi penurunan angka kemiskinan yang berbasis partisipasi yang diharapkan dapat menciptakan proses penguatan sosial yang dapat mengantar masyarakat miskin menuju masyarakat yang madani, sejahtera, berkeadilan serta berlandaskan iman dan takwa<sup>35</sup>.

Pemberdayaan (*empowerment*) dari kata daya, artinya adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu atau bertindak, mempunyai kekuatan. Berdaya, dengan imbuhan 'ber' mempunyai arti kemampuan untuk melakukan sesuatu tindakan, bertenaga, berkekuatan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat)

---

<sup>34</sup> Syarif.2008. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi*. Jakarta: PT. Rajawali Pers, hal 61-62

<sup>35</sup> Sumodiningrat, G. 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa Menanggulangi kemiskinan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: PT. Elex Media Computindo, hal 60

dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya<sup>36</sup>.

Kata “pemberdayaan” merupakan terjemahan dari kata “*empower*”. Dalam Oxford Learner’s Pocket Dictionary, *empower* artinya *give legal power to* (memberikan kekuasaan secara resmi kepada pihak lain)<sup>37</sup>. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pemberdayaan berasal dari kata dasar “*daya*” yang berarti kesanggupan untuk berbuat, kesanggupan untuk melakukan kegiatan, kekuatan, tenaga. Berdaya berarti berkemampuan, bertenga, berkekuatan<sup>38</sup>. Menurut Swift dan Levin, pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur social<sup>39</sup>. Sedangkan menurut Rappaport, pemberdayaan merupakan suatu cara dengan rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya<sup>40</sup>.

Parsons, mendefinisikan pemberdayaan sebagai sebuah proses agar seseorang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagi pengontrolan dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan

<sup>36</sup>Mubyarto. 2000. Membangun Sistem Ekonomi. Yogyakarta: BPFE, hal 263

<sup>37</sup>Manser, Martin H. 1991. Oxford Learner’s Pocket Dictionary Third Edition. Oxford: Oxford, hal 145

<sup>38</sup>Yasyin, Sulchan. 1999. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KB/BESAR) Serta Ejaan yang Disempumakan dan Kosa Kata Baru Untuk Pelajar Dan Umum. Surabaya: Amanah, hal 88

<sup>39</sup>Swift, C dan Levin G. 1987. Empowerment: An Emerging Mental Health Technology. J Primary Prevention. USA, hal 61  
<sup>40</sup>Rappaport, J. (1984). Studies in empowerment: Introduction to the issue, prevention in human issue. New York, hal 3

kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya<sup>41</sup>.

Selanjutnya, Suriadi mengungkapkan upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tiga hal :

- 1) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi manusia berkembang. Titik tolaknya adalah penekanan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi-potensi, kemudian diberikan motivasi dan kesadaran bahwa potensi itu dapat dikembangkan
- 2) Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dimana perlu langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan serta pembukaan berbagai akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat mampu dan memanfaatkan peluang. Pemberdayaan pada jalur ini dapat berupa pemberian berbagai bantuan produktif, pelatihan, pembangunan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial, dan pengembangan kelembagaan di tingkat masyarakat.
- 3) Pemberdayaan mengandung arti pemihakan pada pihak yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan<sup>42</sup>.

#### **b. Tujuan Pemberdayaan**

Sebagai tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hal yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang

<sup>41</sup>Parsons, Ruth J. et.al. 1994. *The Integration of Social Work Practice*. California: Wadsworth, Inc, hal 65

<sup>42</sup>Suriadi, Agus. 2005. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat. (Community Organization and Community Development)*. Medan: Diktat Departemen Kesejahteraan Sosial USU, hal 61

berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya<sup>43</sup>. Pemberdayaan merupakan upaya memberdayakan (mengembangkan klien dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya) guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk membantu masyarakat memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan mereka lakukan yang terkait dengan diri mereka sendiri, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan<sup>44</sup>.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu :

- 1) *Enabling*, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan

---

<sup>43</sup> Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, hal 60

<sup>44</sup> Payne, Adrian. 2007. *The Essence of Service Marketing (Pemasaran Jasa)*. Jakarta: Salemba Empat, hal 143

mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

- 2) *Empowering* Masyarakat, dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain hanya menciptakan iklim dan suasana. Empowering ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.
- 3) *Protecting*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai

program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

### c. Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi

Sumodiningrat, menyatakan bahwa secara konkrit pemberdayaan masyarakat diupayakan melalui pembangunan ekonomi rakyat. Upaya pemberdayaan masyarakat paling tidak harus mencakup lima hal pokok yaitu bantuan dana sebagai modal usaha, pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan, penyediaan sarana, pelatihan bagi masyarakat dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat<sup>45</sup>.

Kartasasmita, mengemukakan pendapatnya bahwa upaya pemberdayaan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara yaitu :

- 1) Menciptakan suasana dan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat kemandirian dan keberdayaan rakyat adalah keyakinan bahwa rakyat memiliki potensi untuk mengorganisasikan dirinya sendiri dan potensi kemandirian individu perlu diberdayakan. Proses pemberdayaan rakyat berakar kuat pada

---

<sup>45</sup>Sumodiningrat, G. 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa Menanggulangi kemiskinan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: PT. Elex Media Computindo, hal 60

proses kemandirian kemandirian setiapindividu yang kemudian meluas ke keluarga, serta kelompok masyarakat baik ditingkat lokal maupun nasional.

- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana, baik fisik maupun sosial yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan bawah.
- 3) Memberdayakan rakyat dalam arti melindungi yang lemah dan membela kepentingan masyarakat lemah, dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah makin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat. Kartasmita mengemukakan pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial<sup>46</sup>.

Sebagaimana telah disebutkan dalam latar belakang penelitian bahwa pemberdayaan pasar tradisional Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan dengan mencanangkan sejumlah program seperti pasar sehat dan nyaman, promosi pasar tradisional, pemberian bantuan dana bergulir dan perbaikan infrastruktur pasar. Perbaikan infrastruktur tersebut dilaksanakan dengan melaksanakan renovasi pasar-pasar tradisional. Selain ini Pemerintah Kabupaten Bantul tidak memberikan ijin untuk pendirian/pembangunan mall, hypermarket atau sejenisnya di wilayah Bantul.

---

<sup>46</sup>Kartasmita, G. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat*. Jakarta: Balai Pustaka, hal 159-160

#### d. Indikator Pemberdayaan

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan, maka perlu diketahui berbagai indikator yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang disebut sebagai empowerment Index atau indeks pemberdayaan, indikator yang dikembangkan antara lain :

##### 1) Kebebasan mobilitas

Kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti kepasar, fasilitas medis, bioskop/hiburan, rumah ibadah, ke rumah tangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.

##### 2) Kemampuan membeli komoditas kecil

Kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu, kebutuhan dirinya seperti minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak,sampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya,terlebih utama lagi jika dapat membeli barang-barang tersebut menggunakan uang sendiri.

##### 3) Kemampuan membeli komoditas besar

Kemampuan individu untuk membeli barang-barang skunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, Koran, majalah, pakaian keluarga, Seperti halnya indikator diatas, poin tinggi

diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut menggunakan uang sendiri.

4) Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga

Mampu membuat keputusan secara mandiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ternak, memperoleh kredit usaha.

5) Kebebasan relatif dari dominasi keluarga

Responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan, dari dia tanpa izinnya, yang melarang bekerja diluar rumah.

6) Kesadaran hukum dan politik

Mengetahui nama salah seorang pegawai-pegawai pemerintah desa/kelurahan, seorang anggota DPRD setempat, nama presiden, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.

7) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes

Seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes misalnya, terhadap suami yang memukul istri, istri yang mengabaikan suami dan

keluarganya, gaji yang tidak adil, penyalahgunaan sosial, atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.

8) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga

Memiliki rumah, tanah, aset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya<sup>47</sup>.

## 5. Pasar Tradisional

### a. Pengertian Pasar Tradisional

Secara harfiah kata Pasar berarti berkumpul untuk tukar menukar barang atau jual beli, yang dilaksanakan sekali dalam 5 hari Jawa. Kata Pasar diduga dari kata Sansekerta *Pancawara*. Yang utama dalam kegiatan pasar adalah interaksi sosial dan ekonomi dalam satu peristiwa. Berkumpul dalam arti saling ketemu muka dan berjual pada hari pasaran menjadi semacam panggilan sosial periodik<sup>48</sup>. Basu Swasta, mendefinisikan pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk belanja, dan kemauan untuk membelanjakannya<sup>49</sup>.

Definisi istilah Pasar tradisional digunakan untuk menunjukkan tempat bagi perdagangan pasar yang asli setempat (*indigeneous native*) yang sudah berlangsung sejak lama. Suatu pasar yang baru dibangun 10

<sup>47</sup>Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama, 63-66

<sup>48</sup>Wiryomartono, A. Bagus P. 1995. Seni Bangunan dan Seni Bina Kota di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal 13

<sup>49</sup>Swasta, Basu. 1995. Pengantar Bisnis Modern, Yogyakarta: Liberty, hal 7

tahun terakhir, misalnya, dapat dimasukkan dalam jenis pasar tradisional karena perdagangannya menggunakan cara-cara tradisional<sup>50</sup>.

Lingkup pasar tradisional sebagai pasar pemerintah, terdapat tiga pelaku utama yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari, yaitu : Penjual, Pembeli dan Pegawai/Pejabat Dinas pasar. Selain tiga pelaku utama tersebut terdapat pelaku yang lain, yaitu buruh panggul, petugas parkir, petugas kebersihan, preman dan copet<sup>51</sup>.

#### **b. Ciri-ciri Pasar Tradisional**

Pasar tradisional menjalankan aktivitasnya secara natural, dimana aturan yang ada dijalankan berdasarkan kesepakatan bersama. Adapun ciri-ciri dari pasar tradisional antara lain :

- 1) Dalam pasar tradisional tidak berlaku fungsi-fungsi manajemen : *Planning, Organizing, Actuating, Controlling*.
- 2) Tidak ada konsep *marketing*, yaitu: Bahwa pembeli adalah raja, terdapat pelayanan penjualan; Penentuan harga berdasarkan perhitungan harga pokok ditambah keuntungan tertentu, Produk berkualitas, Tempat penjualan yang nyaman bagi pembeli, dll

Sedangkan pedagang atau penjual pada pasar tradisional biasanya mempunyai ciri :

- 1) Tempat jualannya kumuh, sempit, tidak nyaman, gelap, kotor;
- 2) Penampilan penjualnya tidak menarik;
- 3) Cara menempatkan barang dagangan tanpa konsep *marketing*.

<sup>50</sup>Pamardi, Utomo. 2002. Merencana Pasar Tradisional di Wilayah Yogyakarta. Solo: Gema Teknik UNS.

<sup>51</sup>Widiatmono, Riasto 2006. Jurnal Bisnis Strategi.

Kemudian adapun pembeli atau konsumen yang mendatangi pasar tradisional umumnya mempunyai ciri :

- 1) Rela berdesak-desakan ditempat yang kumuh dan tidak nyaman;
- 2) Tidak peduli dengan lalu-lalang pembeli lainnya;
- 3) Pembeli pasar tradisional biasanya menguasai dan mengenal pasar tersebut utamanya masalah harga, karena bila tidak tahu, harga komoditas bisa dua atau tiga kali lipat<sup>52</sup>.

### c. Fungsi Pasar Tradisional

Wiryomartono, mengungkapkan bahwa *peken* atau pasar di Jawa merupakan kegiatan yang rutin dimana aktivitas sosial ekonomi terjadi dan berkembang. Pasar di dalam kehidupan urban Jawa menjadi masyarakat sekitarnya untuk menukar, menjual-belikan produksi pertanian maupun industri rumah tangga. Isi dari pasar diperkaya oleh kesempatan-kesempatan atraksi yang bersifat rekreatif sebagai selingan kegiatan rutin<sup>53</sup>.

Menurut Alexander, hal yang menarik dari pasar tradisional bahwa pasar tradisional menyangkut hajat hidup masyarakat yang lebih banyak, dan mayoritas adalah masyarakat kecil. Implikasinya pasar tradisional mempunyai nilai strategis yang tinggi dalam memelihara keseimbangan pembangunan wilayah dan pengendali roda perekonomian<sup>54</sup>. Seiring dengan kegiatan perdagangan, tumbuhlah kegiatan pemerintahan,

---

<sup>52</sup>Ibid.

<sup>53</sup>Ibid

<sup>54</sup>Pamardi, Utomo. 2002. Merencana Pasar Tradisional di Wilayah Yogyakarta. Solo: Gema Teknik UNS.

kebudayaan, dan rekreasi disekitar pasar tersebut. Makin lama kegiatan tersebut makin kompleks dan berkembang, maka tumbuhlah suatu kota<sup>55</sup>.

#### **F. Definisi Konsepsional**

Konsepsional adalah suatu pemikiran umum yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau yang akan diteliti, istilah konsepsional merupakan pengarah atau pedoman yang lebih konkrit, dan teori yang kadang kadang masih abstrak, sehingga diperlukan Definisi Operasional.

Berdasarkan hal tersebut, maka agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah penting antara satu konsep dengan konsep yang lain sehubungan dengan pokok masalah dalam penelitian ini. Adapun definisi-definisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Efektifitas**

Efektifitas merupakan kesesuaian antara perencanaan dan hasil yang diperoleh dari tujuan yang telah ditetapkan. Adapun pengukuran tingkat efektifitas pada penelitian ini adalah: Efisiensi, adil, mengarah kepada insentif, diterima oleh publik dan moral.

##### **2. Peran**

Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu maupu organisasi di dalam suatu masyarakat.

##### **3. Pemerintah Daerah/Kabupaten**

---

<sup>55</sup>Bintarto, 1977. Pengantar Geografi Kota. Yogyakarta: Spring, hal 68-69

Pemerintah daerah adalah pemerintahan yang dibentuk dalam wilayah negara. Pemerintah daerah merupakan aparatur atau organisasi yang berwenang, berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus wilayahnya.

#### 4. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

#### 5. Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah tempat bagi perdagangan pasar yang asli setempat (*indigeneous native*) yang sudah berlangsung sejak lama. Suatu pasar yang baru dibangun 10 tahun terakhir, misalnya, dapat dimasukkan dalam jenis pasar tradisional karena perdagangannya menggunakan cara tradisional.

### G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada mengenai bagaimana cara melihat, menggunakan serta mengukur variabel sehingga penelitian benar-benar terarah dengan baik dan jelas. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Efektifitas Peran Pemerintah Kabupaten Bantul terkait program pemberdayaan pasar tradisional. Efektifitas dilihat dari indikator :
  1. Penggunaan sumberdaya secara efisien
  2. Berkeadilan bagi kepentingan publik
  3. Terdapat insentif untuk perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana
  4. Penerimaan oleh publik.

5. Didesain dengan adanya landasan moral
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Bantul.

Faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pemberdayaan pasar tradisional misalnya sebagai berikut :

- a. Kekurangan dana
- b. Kesadaran yang rendah terhadap kedisiplinan, kebersihan dan ketertiban
- c. Keterlambatan masyarakat dalam mengembalikan pinjaman bergulir
- d. Adanya tekanan dari kelompok pengusaha yang menginginkan pembangunan pasar modern.

Sedangkan faktor yang mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pemberdayaan pasar tradisional misalnya sebagai berikut :

- a. Diterbitkannya peraturan daerah tentang pembatasan pendirian pasar modern yang dekat dengan pasar tradisional
- b. Bekerjanya pengawas pasar dan petugas keamanan pasar dengan baik
- c. Para pedagang memperoleh pinjaman dengan bunga rendah sehingga para pedagang mampu menjalankan bisnisnya dengan baik

## **H. Metode Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian perlu diketahui tentang metode yang digunakan untuk mendapatkan data dalam rangka analisis dan interpretasi data yang ada. Metodologi adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan<sup>56</sup>.

---

<sup>56</sup>Nawawi, Hadari. 1985. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Pers, hal 4

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yang berfungsi sebagai untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta, serta hubungan antara fenomena yang dimiliki.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada sejumlah pasar di Kabupaten Bantul, dengan didasarkan atas keinginan untuk mengetahui secara jelas bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pemberdayaan pasar tradisional, khususnya di Pasar Bantul, Niten, dan Imogiri. Penulis mengambil tiga pasar terbesar dari segi jumlah kios yang dimiliki oleh masing-masing pasar tersebut<sup>57</sup>.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan dua jenis data. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa responden terkait tujuan penelitian ini. Sumber data primer dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

---

<sup>57</sup> Data Pasar Se-Kabupaten Bantul 2010

**Tabel 1.1**  
**Sumber Data Primer**

No	Data Primer yang Diperlukan	Sumber Data
1	Efisiensi Kebijakan (dimaksudkan untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut dapat meningkatkan keefisienan dalam pemberdayaan pasar tradisional)	Pemerintah
2	Berkeadilan (Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan sehingga tercipta rasa keadilan)	Masyarakat
3	Insentif (Untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut dapat merangsang tindakan dalam perbaikan dan peningkatan sasaran yang ditetapkan).	Pemerintah
4	Diterima Publik (Untuk mengetahui apakah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat diterima bagi kepentingan publik)	Masyarakat
5	Landasan Moral (Untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut dilandasi oleh moral yang baik sehingga berpihak bagi masyarakat)	Pemerintah
6	Faktor penghambat (Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam pemberdayaan pasar tradisional)	Pemerintah
7	Faktor pendukung (Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi pendukung dalam pemberdayaan pasar tradisional)	Pemerintah

## 2) Data Sekunder

Data ini diperoleh dari dokumentasi dan laporan-laporan lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan perkembangan/kegiatan pasar tradisional, profil-profil pasar tradisional dan dokumen-dokumen lainnya yang diperoleh dari petugas atau pengurus pasar yang dibuat oleh Kantor Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Bantul atau data dari BPS Bantul. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2 berikut :

**Tabel 1.2**  
**Sumber Data Skunder**

No	Data Skunder yang Diperlukan	Sumber Data
1	Profil Pasar	Kantor Pengelola Pasar Bantul
2	Statistik Harga	BPS

3	Laporan Jumlah pedagang	Kantor Pengelola Pasar Bantul
4	Bantuan Pemerintah terhadap Pasar Tradisional	Kantor Pengelola PasarBantul
5	Kontribusi Pasar terhadap PAD	BPS

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menjawab tujuan penelitian ini, penulis menggunakan teknik teknik wawancara dan dokumentasi. Penjelasan nya sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini terdiri dari wawancara yang dilakukan terhadap tiga puluh pedagang dan petugas pasar di setiap obyek penelitian mengenai program Pemerintah Bantul terkait pemberdayaan pasar tradisional. Wawancara yang terakhir terhadap pejabat Pemerintah Bantul bidang tata ruang daerah.

##### b. Dokumentasi

Penulis dari segi dokumentasi akan mengumpulkan data-data dari setiap obyek penelitian sebagai informasi tambahan dalam menjawab tujuan penelitian ini. Data-data tersebut bisa berupa arsip laporan pertanggung jawaban, foto, maupun informasi dalam bentuk rekaman.

#### 5. Unit Analisis

Dalam penelitian ini unit analisisnya terdiri dari dua pejabat pemerintah dibidang tata ruang daerah Bantul, tiga petugas pasar dan tiga puluh pedagang pasar. Tempatnya meliputi Pasar Bantul, Niten, dan Imogiri.

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data yang diperoleh penulis menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan deskripsi situasi secara sistematis mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan fenomena yang diselidiki tanpa menggunakan perhitungan statistik. Jadi dengan analisa data yang diperoleh akan memberikan gambaran secara deskriptif tentang aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian sehingga akan menjadi jawaban atas masalah yang akan diteliti, selanjutnya data tersebut dapat dianalisis dan diinterpretasikan kebenarannya.

Langkah yang perlu dilakukan adalah dalam proses analisa data menurut Moloeng adalah analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber<sup>58</sup>. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, langkah selanjutnya mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan membuat abstraksi atau rangkuman inti. Setelah itu kemudian menyusun menjadi satuan-satuan. Satuan-satuan ini kemudian dikategorikan dengan membuat koding.

Tahap terakhir dari analisa adalah mengadakan keabsahan data. Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Pada penelitian ini penulis menggunakan triangulasi

---

<sup>58</sup> Moloeng, Lexy. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, hal 112

data. Triangulasi data ini menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara dari subyek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai obyek penelitian. Menurut penulis sendiri, dengan menggunakan triangulasi data sudah cukup mewakili dalam menjawab tujuan penelitian ini.